MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL PADA KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Hani Sri Mulyani1\*, Endah Prihartini2, Dadang Sudirno3 , Ikhlasul Amal4

1,4Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

2,3Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

\**E*-*mail*: hanisrimulyani@unma.ac.id

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Submit: 25 Mei 2024 | Revisi : 7 Juni 2024 | Disetujui: 14 Juni 2024 |

|  |
| --- |
| ABSTRAKKemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik dan urusan pemerintahan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Populasi penelitian menggunakan data realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sampel penelitian sebanyak 18 kabupaten dan 9 kota pada tahun 2019-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda, yang dianalisis dalam program SPSS versi 25. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun secara simultan kedua variabel tersebut juga berpengaruh. |
| ***Kata kunci:*** *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah.* |
| *ABSTRACT**Regional financial independence is the ability of the region to fund development, public services and government affairs independently. This study aims to analyze the effect of regional original income and capital expenditure on regional financial independence. The research population uses data on the realization of the District/City Government APBD in West Java Province. The research sample is 18 districts and 9 cities in 2019-2021. The data analysis method is Multiple Linear Regression, which is analyzed in the SPSS version 25 program. The results of the study reveal that PAD and capital expenditure partially have a significant positive effect on the level of regional financial independence. As for simultaneously the two variables also affect it.* |
| *Keywords*: *Regional Original Income, Capital Expenditure, Regional Financial Independence* |

Copyright ***©*** 2024 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. All rights reserved.

# PENDAHULUAN

Definisi mengenai otonomi daerah dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004. Dilandasakan pada UUD 1945 bahwa pemerintah daerah mencakup daerah besar maupun daerah kecil. Pemerintah provinsi merupakan daerah besar, sementara itu pemerintah kabupaten/kota disebut sebagai daerah kecil. Provinsi merupakan daerah otonom sehingga pemerintah kabupaten atau kota bekan berada di bawah kendalinya. Namun, secara administratif bahwa pemerintah kabupaten/kota menjadi bawahan dari pemerintah provinsi Tujuan dari pemberian otonomi bagi daerah adalah guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, memberdayakan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kesuksesan otonomi daerah dapat dinilai dari tingkat kemandirian daerah.

Pemerintah Indonesia memustuskan untuk memberlakukan otonomi daerah dengan tujuan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, yang dapat dilihat dari kemampuan daerah guna mendanai pembangunan, pelaksanaanpemerintahan, dan pelayanan terhadap masyarakat secara mandiri, dimana pendapatan daerah dapat berasal dari pengembangan potensi daerah dan retribusi pajak (Sintia, 2019). (Rahayu & Halim, 2016)juga mengungkapkan hal yang sama bahwsa kemandirian keuangan daerah ditunjukan dari kemammpuannya dalam mendanai seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, adapun sumber pendapatan dapat diperoleh melalui retribusi dan pembayaran pajak dari masyarakat. Apabila pemerintahan daerah mampu meminimalisir pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan pihak eksternal maka daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

Provinsi Jawa Barat adalah daerah otomom yang mencakup 18 kabupaten dan 9 kota, sehingga setiap pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya, hal ini dilakukan untuk mendorong setiap daerah agar tidak menggantungkan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pihak eksternal. Berikut adalah gambaran Realisasi gambaran penerimaan seluruh Kabupaten/Kota Jawa Barat melalui website http//djpk.kemenkeu.go.id/ yaitu:

## Tabel 1

**Tingkat Kemandirian Keuangan seluruh kabupaten/ kota provinsi Jawa Barat 2019-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Total PAD** | **Total PD** | **Rasio Kemandirian %** |
| 2019 | 44.150.000.000 | 121.911.000.000 | 36,21 |
| 2020 | 39.915.000.000 | 132.143.000.000 | 30,21 |
| 2021 | 41.792.000.000 | 128.149.000.000 | 32,61 |

Sumber: djpk kemenkeu (data diolah 2022)

Berdasarkan tabel di atas PAD berkontribusi terhadap realisasi penerimaan anggaran semua kabupaten /kota Jawa Barat mengalami kenaikan di tahun 2019 - 2021. Pada tahun 2019 kontribusi yang diberikan sebesar 36,21 ini menurun di tahun 2020 yang terjadi ketika masa pandemi covid 19. Kemudian kontribusi meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 32,61. Secara keseluruhan realisasi penerimaan seluruh kbupaten/kota di jawa barat bahwa porsi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) stiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah seluruh daerah jawa barat masih lumayan tinggi hal ini bisa diklihat dari pendapatan dana perimbang terhadap total realisasi penerimaan seluruh daerah Jawa Barat dari tahun 2019 - 2021. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah

maka pemerintah dapat menambah PAD. Kesanggupan daerah dalam mendapatkan PAD menentukan pembangunan dan perkembangan daerah. Kontribusi PAD yang tinggi terhadap APBD dapat memperkecil ketergantungan pendanaan daerah dari APBN. Studi mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak di lakukan diantaranya, menurut (Siti Khadijah Mtd, Maryam Batubara, 2022) pada Kab/Kota di Sumatra Utara PAD mempengaruhi positif pada kemandirian keuangan daerah, menunjukan PAD yang meningkat akan disertai peningkatan kemandirian keuangannya. Sementara itu, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif pada kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan tingginya belanja modal dapat menurunkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintahan daerah Jawa Barat terkait dengan kemandirian keuangan daerah sebagaimana telah di uraikan di atas, serta berasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan asli daerah dan belanja modal dapat mempengaruhi Tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Jawa Barat.

# METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel

Populasi penelitian berupa Data Realisasi APBD Pemerintah 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sesnsus sampling* yaitu teknik guna mengambil sampel jika seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun yang diambil adalah Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ([www.djpk.kemenkeu.go.id.](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/)) yang meliputi kelengkapan data antara lain: data anggaran dan realisasi PAD, dan belanja modal.

## Operasional Variabel

Variabel bebas yakni PAD dan Belanja Modal selama tahun 2019-2021.

Halim dan Kusufi (2012) menyampaikan bahwasanya Pengukuran Rasio Efektivitas PAD dengan rumus:

**Rasio PAD** = (Realisasi PAD) / (Anggaran PAD) x100% untuk pengukuran Rasio Belanja Modal (Eny, 2018) :

**Rasio Belanja Modal** = (Belanja Modal) / (Total belanja daerah) x100%

Variabel terikat (dependent), yakni Kemandirian Keuangan Daerah. Adapun pengukurannya dengan rasio berikut:

## Rasio Kemandirian = (PAD)/(Total Pendapatan) x100%

**Metode Analisis Data**

Metode penelitiannya secara metode deskriptif - verifikatif yaitu regresi linier berganda data dan uji hipotesis. Pengolahan datanya melalui aplikasi SPSS versi 25. Tahapan pengujiannya meliputi: Uji Asumsi klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, dan Kofesien determinasi dan Uji hipotesis

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan guna medeskripsi data berdasarkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rerata, dan nilai standar deviasi. Analisis ini dilakukan terhadap data PAD, Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian daerah tahun 2019-2021. Hasil analisis ditunjukan pada tabel berikut:

**Tabel 2**

**Statistik deskriptif dari PAD, Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian**

**Keuangan Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Minimum | Maximum | Mean | Std.Deviation |
| PAD | 27 | 57,14 | 137,93 | 96,5296 | 16,45173 |
| BELANJA MODAL | 27 | 10,63 | 43,82 | 20,5430 | 10,20776 |
| TINGKATKEMANDIRIAN | 27 | 9,20 | 60,78 | 23,0559 | 13,10601 |
| Valid N (listwise) | 27 |  |  |  |  |

**Analisis Verifikatif**

Dalam analisis verifikatif ini dilakukan uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan pengujian regresi linier berganda, uji koefisien determinas, uji kelayakan model dan uji hipotesis.

## Uji Resresi Linier Berganda

## Tabel 3

**Hasil Uji Regesi Linear Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **t** | **Sig.** |
|  |  |
|  |  |
| **B** | **Std. Error** | **Beta** |
| **1** | **(Constant)** | **-30,124** | **12,790** |  | **-2,355** | **,027** |
| **PAD** | **,331** | **,112** | **,415** | **2,939** | **,007** |
| **BELANJA MODAL** | **1,035** | **,181** | **,806** | **5,710** | **,000** |

***Sumber : Hasil Output SPSS 25***

Didasarkan tabel di atas, rumus regresinya yaitu: Y = -30,124 + 0,334X1+ 1,035X2 + e

## Uji Koefisien Determinasi

## Tabel 4 Hasil Uji R2

|  |
| --- |
| Model Summary |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,763a | ,583 | ,548 | 8,81090 |

Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD

*Sumber : Hasil Output SPSS 25*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Std. Error | Beta |  |  |  |
| 1 | (Constant) | -30,124 | 12,790 |  | -2,355 | ,027 |
| PAD | ,331 | ,112 | ,415 | 2,939 | ,007 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELANJA MODAL | 1,035 | ,181 | ,806 | 5,710 | ,000 |

*Sumber : Hasil Output SPSS 25*

Tabel 3 menunjukan nilai koefisien determinasi, diperoleh nilai *adjust R.Square* 0,583, maka variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikatnya 58,3 % dan lebihnya 41,7% diterangkan variabel lainnya.

## Hasil Uji Hipotesis

Variabel PAD menunjukan nilai t-hitung 2,939 > t-tabel 2,059, dan nilai signifikasi 0,007 < 0,05 maka PAD mempengaruhi signifikan pada tingkat kemandirian.

Variabel belanja modal menunjukan nilai t-hitung 5,710 > t-tabel 2,059 dan nilai signifikansinya 0,000

< 0,05 maka belanja modal mempengaruhi signifikan pada tingkat kemandirian.

**Tabel 5 Hasil Uji F** ANOVAa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Sum ofSquares | Df | MeanSquare | F | Sig. |
| 1 | Regression | 2602,787 | 2 | 1301,39 | 16,764 | ,000b |
| Residual | 1863,168 | 24 | 77,632 |  |  |
| Total | 4465,955 | 26 |  |  |  |

1. Dependent Variable: TINGKAT KEMANDIRIAN
2. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD

Hasil pengujian F didapat nilai F hitung 16,764 dan probabilitasnya 0,000. **Nilai sig. 0,05 didapat nilai F-tabel = (n – k - 1) (27 - 2 - 1) (24) = 3,403. Sehingga,** nilai probability nilai P 0,000 < 0,05 atau **nilai F-hitung 16,764 < nilai F-tabel 3,403**. maka secara simultan PAD dan Belanja Modal mempengaruhi Tingkat Kemandirian Daerah.

## Pembahasan

**Pengaruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian, dengan nilai t-hitung 2,939 > t-tabel 2,059 dan Tingkat signifikansi 0,007 < 0,05. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Simbolon (2011) dan Muliana (2009) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Utami (2018) yang menunjukkan bahwa PAD tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Secara teoritis PAD merupakan komponen pendapatan daerah yang dapat mengkonstruksikan kemandirian keuangan daerah, Dimana tinggi rendahnya PAD akan menentukan tinggi rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri Pembangunan daerahnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut, Hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan pendapatan yang dapat menentukan kemampuan finansial pemerintah daerah dalam membiayai Pembangunan dan pemerintahannya sendiri,

PAD berkontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber daya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi PAD nya agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan dan menciptakan kemandirian keuangan daerah serta mewujudkan tujuan utama otonomi daerah. Dapat disimpulkan PAD yang tinggi akan meningkatkan kemandirian keuangan Daerah.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian, dengan nilai t-hitung 5,710 > t-tabel 2,059 dan Tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ariani dan Putri (2016) dan Simatupang (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengeruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil hasil penelitian Utari (2020) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi tingkat kemandirian..

Belanja modal merupakan belanja asset tetap dan asset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, Alokasi belanja modal yang tepat dapat memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik pada Masyarakat sehingga akan berkontribusi pada pendapatan dan transformasi ekonomi daerah (Dina Apriana, 2023). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa besaran alokasi belanja modal mampu pada pemerintah daerah kab/kota di provinsi jawa Barat mampu mengoptimalkan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur penghubung antar daerah. Tingginya jumlah Belanja modal dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan dapat mengoptimalkan keikutsertaan publik dalam pembangunan melalui peningkatan PAD. Kelengkapan fasilitas publik dapat memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga terwujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat daerah. Disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji ANOVA untuk uji simultan menunjukan nilai Pvalue sebesar 0,000 < 0,05 atau nilai F-hitung 16,764 < nilai F-tabel 3,403. Maka secara simultan PAD dan belanja modal mempengaruhi Tingkat Kemandirian Daerah. Kedua variabel tersebut menyumbang 0,583 (58,3%) terhadap variabel independent, sementara itu sisanya 41,7% dipengaruhi variabel lainnya.

Hasil ini sejalan dengan hasil studi dari (Yayang Bella, tri Purwani, 2023) secara simultan variabel PAD, DAU dan belanja modal mempengaruhi positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

# KESIMPULAN

Didasarkan hasil penelitian ini maka kesimpulannya yaitu:

1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah**.**

# SARAN

Didasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran dari peneliti diantaranya:

1. Pemerintah daerah di Jawa Barat harus mampu meningkatkan kemandirian daerah melalui upaya penggalian potensi sumber daya setiap daerah agar PAD dapat ditingkatkan, misalnya dengan intensifikasi data perpajakan yang dapat meningkatkan ketepatan target penerimaan pajal daerah yang akan meningkatkan penerimaan daerah.
2. Pemerintah sebaiknya mengalokasikan pengeluaran **untuk kepentingan** masyarakat melalui belanja modal. Belanja modal dapat menjadi salah satu saran bagi peningkatana pendapatan daerah. Tingginya alokasi infrastruktur dan perbaikan sarana prasarana akan memberikan kemudahan pada Masyarakat dalam melakukan kegiatan prekonomiannya, mempermudah investor masuk ke daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti daerah-darah di Jawa Barat, dan hanya ada dua variabel independen, serta tahun penelitian yang digunakan hanya tiga tahun penelitian. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya:
	1. menambah variable lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan, diantaranya: ekstensifikasi PAD. Investasi dll
	2. memperlias pupolasi sehingga hasil yang diperoleh bisa digeneralisasikan
	3. memperhatikan periode waktu penelitian mengingat variabel dalam penelitian ini memiliki time lag/rentang waktu

# DAFTAR PUSTAKA

Dina Apriana, R. S. (2023). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Journal Accounting and Invesment*, *11*(1).

Rahayu, H. A., & Halim, A. (2016). Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen*, *03*(1).

Sintia, L. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *STIESIA Journal*.

Siti Khadijah Mtd, Maryam Batubara, N. A. B. R. (2022). The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditures on the Government’s Financial Performance in The Regency/City of North Sumatra Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*.

Yayang Bella, tri Purwani, I. L. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *16*(2).